

SKRIPSI

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG

HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA TERHADAP

PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPR RI



Oleh:
SAHABUDIN OHOIRENAN
1800024214

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2023

THESIS

IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT RULING

ON THE POLITICAL RIGHTS OF FORMER CONVICTS ON

THE CANDIDACY OF REGIONAL HEADS AND MEMBERS OF

THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE

REPUBLIC OF INDONESIA



Written By:
SAHABUDIN OHOIRENAN
1800024214

This thesis as a fulfillment of the requirements to attain the Bachelor
Degree of legal studies

FACULTY OF LAW
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY
YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HAK POLITIK
MANTAN TERPIDANA TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN
ANGGOTA DPR-RI

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rahmat Nugroho", is written over the printed name.

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

NIY: 60010311

APPROVAL PAGE

IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT RULING ON
THE POLITICAL RIGHTS OF FORMER CONVICTS ON THE
CANDIDACY OF REGIONAL HEADS AND MEMBERS OF THE
PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA



This Thesis Submit As A Fulfillment Of The Requirement To Attain The Bachelor
Degree Of Legal Studies At Faculty Of Law Universitas Ahmad Dahlan

Supervisor,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rahmat Muhajir Nugroho".

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

NIY: 60010311

HALAMAN PENGESAHAN

v

**HALAMAN PENGESAHAN
DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pada Tanggal:

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Dr. Sobirin, S.H., M.Hum.



(Handwritten signatures of the three members of the examination board)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



Dr. ... S.H., M. Hum.

NIP. ...

(Handwritten signature of the Dean of the Faculty of Law)

APPROVAL PAGE

ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW OF
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS A FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR DEGREE OF LAW

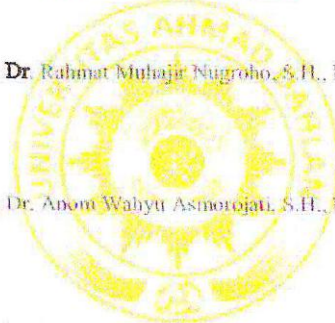
At the Date:

THE EXAMINER BOARD:

Chairman : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Examiner 1 : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.

Examiner 2 : Dr. Sobirin, S.H., M.Hum.

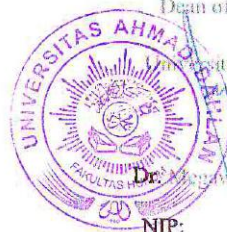


Handwritten signatures of the three examiners

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. ... S.H., M. Hum.

NIP:

PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahabudin Ohoirenan

NIM : 1800024214

Email : Sahabudin1800024214@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Politik Mantan Terpidana Terhadap Pencalonan Kepala Daerah dan Anggota DPR-RP" Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023



Sahabudin Ohoirenan

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahabudin Ohoirenan

NIM : 1800024214

Email : sahabudin1800024214@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik Mantan Terpidana Terhadap Pencalonan Kepala Daerah dan Anggota DPR-RI.

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):



Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.

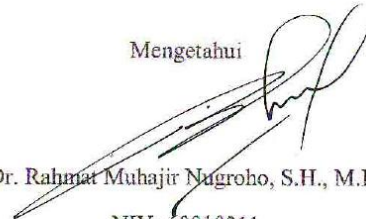
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023



Sahabudin Ohoirenan

Mengetahui



Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

NIY: 60010311

HALAMAN MOTTO

“Kamu membutuhkan kekacauan dalam dirimu untuk melahirkan bintang yang menari-nari”

- Nietzsche

“Kadang kau akan tersandung, kadang kau akan jatuh, tapi meski kau merasa tersesat jika kau jujur pada dirimu sendiri jalan itu akan menemukanmu lagi”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang luar biasa kebaikannya hingga saya sampai pada tahap ini.

- ❖ Untuk Orang Tua dan segenap Keluarga Besar saya yang sangat mempengaruhi hidup saya.
- ❖ Untuk diri saya sendiri yang dengan sabar menekuni proses pencarian eksistensi
- ❖ Untuk Sahabat-Sahabat saya yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada saya.
- ❖ Untuk adik-adik saya yang berada di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
- ❖ Almamater Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulis tugas akhir ini dengan lancar. Skripsi ini berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik Mantan Terpidana Terhadap Pencalonan Kepala Daerah dan Anggota DPR-RI.” Dapat selesai dengan lancar, dalam proses penyelesaian skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak hingga pada akhirnya skripsi ini dapat selesai. Sehubungan dengan selesainya skripsi ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.
2. Dr. Megawati, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
3. Muhammad Nur, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala bimbingan dan nasehat yang telah di berikan kepada penulis dalam menempuh proses belajar.
4. Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala kebaikannya dalam proses membimbing dan selalu memberikan masukan ilmu pengetahuan dan selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu di kampus ini. Para staf administrasi dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
6. Terimakasih kepada ibu dan bapak, yang selalu mendoakan saya dalam segala hal sampai saat ini dalam pembuatan skripsi, dan terimakasih juga telah memberikan semangat serta motivasi untuk terus mencari ilmu.
7. Terimakasih juga kepada ketiga kaka dan ketiga adik saya, yang selalu memberikan semangat secara langsung maupun tak langsung.
8. Terimahkasih kepada diri saya

Terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat penulis nantikan dari pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
APPROVAL PAGE	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
APPROVAL PAGE	vi
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Objek Penelitian.....	12
3. Sumber Data dan Bahan Hukum	12

4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data.....	15
BAB II.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori	18
1. Teori Keadilan	18
2. Teori Hak Asasi Manusia	21
3. Teori Pengujian Undang-Undang	29
4. Teori Demokrasi	35
BAB III.....	43
A. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik Mantan Terpidana	45
1. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009	45
2. Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015	49
3. Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019	58
B. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik Mantan Terpidana Perspektif Keadilan, HAM, dan Pengujian Undang-Undang.....	61
1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 Perspektif Keadilan	61
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XII/2015 Perspektif Hak Asasi Manusia.....	67

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 Perspektif Keadilan dan HAM.....	74
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Pengujian Undang-Undang	79
C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik	
Mantan Terpidana Perspektif Demokrasi	93
1. DPR-RI Pemilu 2019	94
2. Kepala Daerah Pilkada 2020.....	100
BAB IV	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPR RI

SAHABUDIN OHOIRENAN

Abstrak

UUD NRI Tahun 1945 mengatur perihal tiga kategori hak, dua diantaranya adalah hak individu dan hak kolektif masyarakat. Dalam pertantangan antara kedua hak tersebut harus dilakukan dengan baik dan secara konstitusional diselesaikan dimahkamah konstitusi. Dalam penelitian ini penulis meneliti tiga putusan mk yakni nomor 4/PUU/2009, 42/PUU/2015 dan 56/PUU/2019 yang menyangkut pertantangan antara hak individu untuk menduduki jabatan publik (dalam hal ini mantan terpidana) dan hak kolektif masyarakat untuk memperoleh seorang pemimpin yang berkualitas dengan menggunakan teori keadilan, HAM, pengujian UU dan demokrasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif terhadap data sekunder. Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam pemilu dan pilkada.

Hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa putusan MK nomor 4/PUU/2009 yang memberikan Batasan terhadap mantan terpidana sejalan dengan teori keadilan. Putusan mk no 42/PUU/2015 yang melonggarkan Batasan sehingga tidak sejalan dengan prinsip pembatasan ham dan putusan mk nomor 56/PUU/2019 yang Kembali memberikan Batasan terhadap mantan terpidana oleh karena fakta empirik yang mendesak sehingga mk mencerminkan fungsinya sebagai pelindung hak asasi warga negara telah sejalan dengan keadilan dan pembatasan ham. Implikasi dari putusan Mk dalam Pileg 2019 karena persyatan menjadi longgar maka mantan terpidana menjadi bebas untuk mencalonkan diri. Pada pemilu 2020 syarat terhadap mantan terpidana Kembali di ketatkan oleh MK karena fakta empiris bahwa mantan terpidana Kembali menggulangi perbuatannya yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Kata Kunci : Implikasi, Mahkamah Konstitusi, Hak Politik, Terpidana, Pencalonan

IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT RULING ON THE POLITICAL RIGHTS OF FORMER CONVICTS ON THE CANDIDACY OF REGIONAL HEADS AND MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SAHABUDIN OHOIRENAN

Abstract

The 1945 Constitution regulates three categories of rights, two of which are individual rights and collective community rights. In the challenge between the two rights, it must be done properly and constitutionally resolved in the constitutional court. In this study, the author examines three Constitutional Court decisions, namely numbers 4/PUU/2009, 42/PUU/2015 and 56/PUU/2019, which concern challenges between individual rights to hold public office (in this case former convicts) and the collective rights of the community to obtain a qualified leader by using theories of justice, human rights, judicial review and democracy.

The method used in this research is normative juridical. Data analysis is descriptive qualitative of secondary data. The purpose of this research is to find out the basis of consideration of the Constitutional Court and its implications in elections and local elections.

The results of this study, the author concludes that the Constitutional Court's decision number 4 / PUU / 2009 which provides restrictions on ex-convicts is in line with the theory of justice. Constitutional Court decision number 42/PUU/2015 which loosened the restrictions so that it was not in line with the principle of limiting human rights and Constitutional Court decision number 56/PUU/2019 which again provided restrictions on ex-convicts due to urgent empirical facts so that Constitutional Court reflected its function as a protector of citizens' human rights was in line with justice and limiting human rights. The implication of the Constitutional Court decision in the 2019 legislative election is that because the requirements are loosened, the Constitutional Court will be able to protect the rights of citizens in line with justice and human rights restrictions.

Keywords : Implication, Constitutional Court, Political Rights, Convicted, Candidacy